

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015



DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	21
3.2. Program dan Kegiatan	22
BAB IV : PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. ..Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2014	10
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	18
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Perkiraan Maju tahun 2016	23

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dapat diterbitkan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Kerja (RENJA-SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENJA-SKPD Tahun 2015 ini maka Dinas Pekerjaan Umum mempunyai acuan tentang arah pembangunan ke depan yang diharapkan dapat direalisasikan sesuai perencanaannya.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENJA-SKPD Tahun 2015 ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka pendek dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Pangkalan Bun, 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Ir. AGUS YUWONO, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590814 198812 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan riil penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang berisi program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum 2015 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 juga harus memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, serta hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat s.d. tahun 2014 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2014 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan 22 program yang terdiri dari 57 kegiatan.
2. Realisasi program/kegiatan telah sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2014, dengan demikian pelaksanaan selanjutnya akan terus dilakukan pemantauan sehingga target rencana kerja (Renja) yang diharapkan pada akhir tahun anggaran 2014 dapat terealisasi 100%.
3. Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2014 atau tahun ke-3 periode Renstra SKPD terus mengalami peningkatan capaian bahkan ada beberapa program/kegiatan yang telah mencapai target yang diharapkan pada akhir periode Renstra SKPD (tahun 2016), yaitu :
 - kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai, target Renstra sampai dengan tahun 2016 tersedianya bangunan pengaman pantai sepanjang 838,21 meter, sedangkan sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai 1.184 meter;
 - kegiatan perencanaan pengembangan infrastruktur, target Renstra sampai dengan tahun 2016 menerbitkan 3 set dokumen, sedangkan sampai dengan tahun 2014 sudah tercapai 7 set dokumen perencanaan;
 - kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, target Renstra sampai dengan tahun 2016 tersedia jaringan perpipaan sepanjang 3.000,60 meter, sedangkan sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai 11.000 meter.
4. Pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) kegiatan baru yang semula belum terdapat dalam Renstra 2012-2016, yaitu peningkatan jalan, peningkatan jalan lingkungan pemukiman, pengadaan alat-alat berat, peningkatan jaringan irigasi, pembangunan/peningkatan infrastruktur, dan peningkatan jalan perdesaan. Kegiatan-kegiatan tersebut diusulkan sehubungan dengan penyesuaian penganggaran agar tidak terjadi kesalahan penganggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Sehubungan dengan kinerja pelayanan SKPD, perlu dilakukan pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai

sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target capaian kinerja pelayanan SKPD sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel2.2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator pelayanan yang dilaksanakan terdapat 5 (lima) indikator pelayanan yang masih jauh dari SPM/standar nasional maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator dimaksud terdiri dari :

1. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman;
2. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;
3. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
4. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota;
5. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Adapun permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD pada umumnya adalah ketersediaan dana guna mendukung program-program/kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk membangun daerah mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang professional dalam melaksanakan tugasnya juga masih kurang dari segi kuantitasnya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur untuk mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan;

2. Jaringan irigasi untuk mendukung program ketahanan pangan;
3. Laju kerusakan pantai akibat abrasi yang cukup tinggi;
4. Pelayanan ketersediaan air bersih dan sanitasi masih belum optimal;
5. Daya dukung kawasan terhadap kualitas lingkungan terkait pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup;
6. Kepadatan penduduk terutama di perkotaan memicu timbulnya beberapa masalah terkait penataan bangunan gedung, antara lain kurangnya ketersediaan lahan, air bersih, dan ruang terbuka hijau (RTH);
7. Tuntutan sustainable development dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup; dan
8. Optimalisasi kinerja aparatur, maka para aparatur pemerintah diharapkan tetap mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin barat adalah:

1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, kelancaran distribusi barang dan jasa;
2. Menjamin ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan;
3. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur (permukiman, jalan dan jembatan) di 6 (enam) kecamatan;
4. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
6. Meningkatkan pemanfaatan tata ruang kota dan melakukan pengelolaan/pemeliharaan ruang terbuka hijau; dan
7. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Sasaran spesifik yang ingin dicapai dari renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang mencukupi serta terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian dan konsumsi masyarakat;
3. Berkurangnya laju kerusakan lingkungan;
4. Terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6. Tertatanya tata ruang kota sesuai dengan rencana yang telah ada (RTRW); dan
7. Meningkatnya sarana dan prasarana di kawasan potensial.

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Label 3.1
6 lembar

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang berisi program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat, dengan kaidah pelaksanaannya adalah menyesuaikan dengan penjabaran visi dan misi dari Bupati terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah 2012-2016.

Demikian Renja SKPD ini disusun semoga pada pelaksanaannya di tahun 2015 dapat direalisasikan sehingga target pelayanan SKPD dapat tercapai dan pembangunan daerah lebih terarah sesuai harapan bersama.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. AGUS YUWONO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590814 198812 1 001

**Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2014
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Kabupaten Kotawaringin Barat**

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2013			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2014		
					Target Renja SKPD s/d Tahun 2013	Realisasi Renja SKPD s/d Tahun 2013	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11	
1											
1	03										
1	03	01									
1	03	01	01	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya Koordinasi dan Komunikasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran informasi, komunikasi dan pelayanan publik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Menunjang kelancaran kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat, bersih dan nyaman	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

					(%)									
1	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelancaran pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelayanan publik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran pelaksanaan kerja Dinas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan public (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kelancaran pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Menunjang pelaksanaan kerja									
1	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Menunjang kenyamanan dan keindahan kantor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Menunjang pelaksanaan tugas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas								
1	03	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kelancaran kerja dalam pelayanan publik								
1	03	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kelancaran kerja dalam pelayanan publik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Menunjang pelaksanaan kerja								
1	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya ruas-ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah								

1	03	15	03	Pembangunan jalan	Terbangunnya jalan (Km)	2.423,23	1.182,51	50,00	50,00	100,00	5,00	1.237,51	51,07
1	03	15	05	Pembangunan jembatan	Terbangunnya jembatan (Unit)	791,00	26,00	20,00	20,00	100,00	29,00	75,00	9,48
1	03	15	07	Peningkatan Jalan	Memperlancar arus lalu lintas jalan (Km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
1	03	15	09	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Memperlancar arus lalu lintas jalan lingkungan (Km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
1	03	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong								
1	03	16	03	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Terbangunnya saluran (m)	120.623,46	14.915,00	19.690,00	19.690,00	100,00	12.139,00	46.744,00	38,75
1	03	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Tertanganinya erosi tebing sungai dan jalan								
1	03	17	03	Pembangunan turap/talud/bronjong	Tertanganinya Longsor (m)	5.043,82	1.043,00	1.108,00	1.108,00	100,00	590,00	2.741,00	54,34
1	03	18		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan								
1	03	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terpeliharanya jalan (km)	2.423,23	112,33	125,00	125,00	100,00	30,00	267,33	11,03
1	03	18	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terpeliharanya jembatan (unit)	791,00	28,00	28,00	28,00	100,00	21,00	77,00	9,73
1	03	22		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Terlaksananya penyusunan data base jalan dan jembatan								

1	03	22	01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersedianya database jalan (set-dok)	15,00	1,00	1,00	1,00	100,00	3,00	5,00	33,33
1	03	22	02	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Tersedianya database jembatan (set-dok)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
1	03	23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedia dan terpeliharanya alat berat serta alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan								
1	03	23	04	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya alat berat (unit)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
1	03	23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Tersedianya alat ukur (buah) Tersedianya bahan laboratorium (jenis)	140 10	28 10	28 10	28 10	100,00 100,00	20 9	76 19	54,28 100,00
1	03	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat berat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	23	12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Terpeliharanya alat ukur (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan								
1	03	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersusunnya dokumen inventarisasi jaringan irigasi dan reklamasi rawa (set-dok)	44,00	2,00	2,00	2,00	100,00	5,00	9,00	20,45
1	03	24	08	Pembangunan pintu air	Tersedianya bangunan air (unit)	197,00	4,00	17,00	17,00	100,00	7,00	28,00	14,21
1	03	24	09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Normalisasi sungai (m)	80.266,35	13.000,00	27.950,00	27.950,00	100,00	32.900,00	73.850,00	92,01

1	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pemeliharaan saluran irigasi/rawa dan bangunan air (m)	1.120.742,88	77.750,00	186.300,00	186.300,00	100,00	216.000	480.050,00	42,83
1	03	24	14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Pemeliharaan sungai (m) Penanganan danau (buah)	109.567,62 -	26.250 1	30.350 -	30.350 -	100,00 100,00	33.000 -	89.600 1	81,77 100
1	03	24	15	Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Terselenggaranya KTNA & Komisi irigasi	8,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	75,00
1	03	24	18	Pembangunan jaringan irigasi	Tersedianya saluran DI/DR (m) pembuatan tanggul (m) jalan usaha tani (m)	502.512,58 28.734,11 38.019,96	92.025 0 8.240	62.950 0 15.470	62.950 0 15.470	100,00 - 100,00	40.350 0 0	195.325 0 23.710	38,87 - 62,36
1	03	24	19	Peningkatan jaringan irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi (m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.325,00	60.325,00	
1	03	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terbangunnya instalasi jaringan air limbah kotor (SPAL)								
1	03	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Trsedianya instalasi air kotor (unit)	139,21	2,00	1,00	1,00	100,00	4,00	7,00	5,03
1	03	27	06	Pengembangan distribusi air minum	Panjang jaringan perpipaan (m) Jumlah instalasi (unit)	62.908,41 11,78	2.030 1	1.000 1	1.000 1	100,00 100,00	19.391 -	22.421 2	35,64 18,18
1	03	28		Program Pengendalian Banjir	Mengendalikan banjir pada daerah genangan air di kawasan perkotaan								
1	03	28	06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Peningkatan & normalisasi saluran- pengendali banjir (m) Panjang parit (m)	96.755,13 4.717,69	21.512 0	12.966 0	12.966 0	100,00 -	34.900 0	69.378 -	35,63 -
1	03	28	09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Bangunan pengaman pantai (m)	838,21	274,00	410,00	410,00	100,00	500,00	1.184,00	141,25
1	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tercapainya perencanaan pengembangan infrastruktur								
1	03	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya database perumahan & Permukiman (set-dok)	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00	7,00	233,33

1	03	29	02	Pembangunan/Peningkatan infrastruktur	Tersedianya bangunan strategis (unit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan/kelurahan								
1	03	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan	Terbangunnya jalan (m) Terbangunnya jembatan (m)	747.751,60 40.823,22	17.277 612	28.438 502	28.438 502	100,00 100,00	0,00	45.715 1.114	6,11 2,73
1	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Tersedianya instalasi air bersih (unit) Tersedianya jaringan perpipaan (m)	- 3.000,60	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 100	- 3.000	- 11.000	0 366,59
1	03	30	05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan	Terpeliharanya jalan perdesaaan (m) Terpeliharanya jembatan perdesaaan(m)	771.062,3040. 211,10	65.453,20-	99.586-	99.586-	100,00-	41.051-	206.090,20-	21,40-
1	03	30	09	Peningkatan jalan perdesaaan	Kelancaran arus lalu lintas perdesaaan (m)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1	04			BIDANG URUSAN PERUMAHAN									
1	04	20		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya pengelolaan Taman Pemakaman Umum								
1	04	20	06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Luas makam tertata (Ha)	34,90	34,90	34,90	34,90	100,00	34,90	34,90	100,00
1	05			BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG									
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya perencanaan tata ruang								
1	05	15	06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang (set-dok)	12,00	3,00	3,00	3,00	100,00	1,00	7,00	58,33
							0,00						
1	08			BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									

1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pengelolaan persampahan								
1	08	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah TPS (unit) Jumlah gerobak sampah (unit) Jumlah depo transfer (unit)	1.005 566 13	65 15 1	10 - 3	10 - 3	100,00 100,00 100,00	6 - -	81 15 4	8,06 2,65 30,77
1	08	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya sarana & prasarana pembersihan & pengangkutan sampah kota (org)	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
1	08	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pengelolaan RTH								
1	08	24	05	Penataan RTH	Kawasan RTH tertata (Ha)	109,10	0,25	0,25	0,25	100,00	0,25	100,00	100,00
1	08	24	06	Pemeliharaan RTH	Kawasan RTH terpelihara (Ha)	109,10	0,25	0,25	0,25	100,00	0,25	100,00	100,00
JUMLAH													

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013 (thn n-2)	Tahun 2014 (thn n-1)	Tahun 2015 (thn n)	Tahun 2016 (thn n+1)	Tahun 2013 (thn n-2)	Tahun 2014 (thn n-1)	Tahun 2015 (thn n)	Tahun 2016 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	79,33%	62,00 %	67,00%	73,00 %	79,00%	62,00 %	67,00%	73,00%	79,00 %	
2	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60%	100,00%	18,00 %	21,00%	24,00 %	27,00%	18,00 %	21,00%	24,00%	27,00 %	
3	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	0,75%	0,42 %	0,52%	0,62 %	0,75%	0,42%	0,52%	0,62%	0,75%	
4	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	75,81%	67,54 %	68,53%	72,61 %	75,81%	67,54 %	68,53%	72,61%	75,81 %	
5	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	14,63%	17,07 %	16,21%	15,40 %	14,63%	17,07 %	16,21%	15,40%	14,63 %	

6	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota	100%	14,00%	8,00 %	10,00%	12,00 %	14,00%	8,00%	10,00%	12,00%	14,00 %	
7	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25%	12,50%	0,01 %	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Perkiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		URUSAN WAJIB									
1	03	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM									
1	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Arsel	1.725.463.100			1.768.599.678		
1	03	01	01	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya Koordinasi dan Komunikasi (%)	Kec. Arsel		APBD	0		
1	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran informasi, komunikasi dan pelayanan publik (%)	Kec. Arsel	100 %	167.400.000	APBD	100 %	171.585.000
1	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Menunjang kelancaran kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	37.454.000	APBD	100 %	38.390.350
1	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan (%)	Kec. Arsel	100 %	738.202.500	APBD	100 %	756.657.563
1	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat, bersih dan nyaman (%)	Kec. Arsel	100 %	8.190.000	APBD	100 %	8.394.750

1	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelancaran pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	34.900.000,00	APBD	100 %	35.772.500
1	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelayanan publik (%)	Kec. Arsel	100 %	73.430.100,00	APBD	100 %	75.265.853
1	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran pelaksanaan kerja Dinas (%)	Kec. Arsel	100 %	50.595.000,00	APBD	100 %	51.859.875
1	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	2.533.000	APBD	100 %	2.596.325
1	03	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan public (%)	Kec. Arsel	100 %	185.000.000	APBD	100 %	189.625.000
1	03	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kelancaran pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel		-	APBD		0
1	03	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	427.758.500	APBD	100 %	438.452.463
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Menunjang pelaksanaan kerja			488.924.400			501.147.510
1	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	250.000.000	APBD	100 %	256.250.000
1	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel		-	APBD		0
1	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	67.047.758	APBD	100 %	68.723.952
1	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Menunjang kenyamanan dan keindahan kantor (%)	Kec. Arsel		-	APBD		0
1	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Menunjang pelaksanaan tugas (%)	Kec. Arsel	100 %	145.119.000	APBD	100 %	148.746.975
1	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	26.757.642	APBD	100 %	27.426.583
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakalan dinas			82.500.000			84.562.500
1	03	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (%)	Kec. Arsel	100 %	82.500.000	APBD	100 %	84.562.500
1	03	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus (%)	Kec. Arsel		-	APBD		0
	03	03	04	Pengadaan pakaian KOPRI	Tersedianya pakaian KOPRI	Kec. Arsel		-	APBD		0
1	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kelancaran kerja dalam pelayanan publik			200.000.000			205.000.000

1	03	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kelancaran kerja dalam pelayanan publik (%)		100 %	200.000.000	APBD		100 %	205.000.000
1	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Menunjang pelaksanaan kerja			3.112.500				3.190.313
1	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	587.500	APBD		100 %	602.188
1	03	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	1.200.000	APBD		100 %	1.230.000
1	03	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Menunjang pelaksanaan kerja (%)	Kec. Arsel	100 %	1.325.000	APBD		100 %	1.358.125
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya ruas-ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah			149.800.000.000				153.545.000.000
1	03	15	03	Pembangunan jalan	Memperlancar arus lalu lintas jalan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng	30 pa ket	103.300.000.000	APBD		30 pa ket	105.882.500.000
1	03	15	05	Pembangunan jembatan	Memperlancar arus lalu lintas jembatan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng	12 pa ket	8.200.000.000	APBD		12 pa ket	8.405.000.000
1	03	15	07	Peningkatan Jalan	Memperlancar arus lalu lintas jalan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng	32 pa ket	31.000.000.000	APBD		32 pa ket	31.775.000.000
1	03	15	09	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Memperlancar arus lalu lintas jalan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam	12 pa ket	7.300.000.000	APBD		12 pa ket	7.482.500.000
1	03	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			6.950.000.000				7.123.750.000
1	03	16	03	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Panjang saluran	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng	30 pa ket	6.950.000.000	APBD		30 pa ket	7.123.750.000

1	03	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	Tertanganinya erosi tebing sungai dan jalan				1.500.000.000					1.537.500.000
1	03	17	03	Pembangunan turap/talud/ brojong	Tersedianya bangunan pengaman tebing sungai	Kec.Kumai+ Kolam+Aruta	686 me ter		1.500.000.000	APBD		686 me ter		1.537.500.000
1	03	18		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng			31.700.000.000					32.492.500.000
1	03	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Memperlancar arus lalu lintas jalan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng	45 pa ket		30.100.000.000	APBD		45 pa ket		30.852.500.000
1	03	18	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Memperlancar arus lalu lintas jembatan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng	10 pa ket		1.600.000.000	APBD		10 pa ket		1.640.000.000
1	03	22		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Terlaksananya penyusunan data base jalan dan jembatan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng			350.000.000					358.750.000
1	03	22	01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersedianya data base jalan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng	1 set do k		300.000.000	APBD		1 set do k		307.500.000
1	03	22	02	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Tersedianya data base jembatan	Kecamatan Arsel + Aruta + Kumai + Kolam + P.Lada + P.Banteng	1 set do k		50.000.000	APBD		1 set do k		51.250.000
1	03	23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedia dan terpeliharanya alat berat serta alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan				1.500.000.000					1.537.500.000
1	03	23	04	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya mesin genset	Arsel				APBD				
1	03	23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Tersedianya bahan dan alat laboratorium kebinamargaan	Arsel	1 pa ket		440.000.000	APBD		1 pa ket		451.000.000

1	03	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Tersedianya suku cadang alat berat	Arsel	1	tahun	1.020.000.000	APBD		1	tahun	1.045.500.000
1	03	23	12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Terpeliharanya alat laboratorium kebinamargaan	Arsel	1	tahun	40.000.000	APBD		1	tahun	41.000.000
1	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan				11.954.000.000					12.252.850.000
1	03	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersusunnya dokumen data inventarisasi jaringan irigasi	Arsel	1	set dok	200.000.000	APBD		1	set dok	205.000.000
1	03	24	08	Pembangunan pintu air	Tersedianya bangunan air	Arsel+Kumai+P.Banteng+ P.Lada	12	bh	1.000.000.000	APBD		12	bh	1.025.000.000
1	03	24	09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Normalisasi sungai	Arsel+Kumai+ P.Banteng+ Aruta	14.00	m	1.500.000.000	APBD		14.00	m	1.537.500.000
1	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pemeliharaan saluran irigasi/rawa dan bangunan air	Arsel+Kumai+P.Lada+P.Banteng+ Kolam	111.500	m	2.000.000.000	APBD		111.500	m	2.050.000.000
1	03	24	14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Pemeliharaan sungai	Arsel+Kumai	22.600	m	300.000.000	APBD		22.600	m	307.500.000
1	03	24	15	Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Terselenggaranya KTNA dan Komisi Irigasi	Kec. Arsel	1	pa ket	254.000.000	APBD		1	pa ket	260.350.000
1	03	24	18	Pembangunan jaringan irigasi	Tersedianya saluran DI/DR	Arsel+Kumai+Kolam	46.750	me ter	6.700.000.000	APBD		46.750	me ter	6.867.500.000
1	03	24	19	Peningkatan jaringan irigasi	Pemeliharaan Jaringan irigasi	Arsel+Kumai+Kolam+P.Lada+P. Banteng				APBD				0
1	03	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terbangunnya instalasi jaringan air limbah kotor (SPAL)				3.200.000.000					3.280.000.000
1	03	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Tersedianya instalasi air kotor	Kec. Arsel+Kumai	1	Pa ket	400.000.000	APBD		1	Pa ket	410.000.000
1	03	27	06	Pengembangan distribusi air minum	Tersedianya jaringan air minum	Arsel+Kumai+Kolam+P. Lada+P. Banteng	15.025	me ter	2.800.000.000	APBD		15.025	me ter	2.870.000.000
1	03	28		Program Pengendalian Banjir	Mengendalikan banjir pada daerah genangan air di kawasan perkotaan				5.800.000.000					5.945.000.000

1	03	28	06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Peningkatan dan normalisasi saluran pengendali banjir	Arsel+Kumai	10 pa ket	1.500.000.000	APBD		10 pa ket	1.537.500.000
1	03	28	09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Bangunan pengaman pantai	Kumai	2.208 m	4.300.000.000	APBD		2.208 m	4.407.500.000
1	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tercapainya perencanaan pengembangan infrastruktur			3.600.000.000				3.690.000.000
1	03	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya data base Perumahan dan Permukiman	Kec. Arsel	5 Pa ket	600.000.000	APBD		5 Pa ket	615.000.000
1	03	29	02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Tersedianya Bangunan Strategis	Kec. Arsel	6 unit	3.000.000.000	APBD		6 unit	3.075.000.000
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan/kelurahan			13.046.000.000				13.372.150.000
1	03	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan	Terbangunnya jalan Perdesaaan Terbangunnya jembatan Perdesaaan							
1	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Jaringan Perpipaan	Arsel+Kumai+P. Lada	3 Pa ket	1.346.000.000	APBD		3 Pa ket	1.379.650.000
1	03	30	05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan	Terpeliharanya jalan perdesaaan	Arsel+Kumai+P.Lada+P.Banteng+Kolam+Aruta	14 Pa ket	3.200.000.000	APBD		14 Pa ket	3.280.000.000
1	03	30	09	Peningkatan jalan perdesaaan	Terpeliharanya jalan perdesaaan	Arsel+Kumai+P.Lada+P.Banteng+Kolam+Aruta	28 Pa ket	8.500.000.000	APBD		28 Pa ket	8.712.500.000
1	04			BIDANG URUSAN PERUMAHAN								
1	04	20		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya pengelolaan Taman Pemakaman Umum	Arsel+Kumai+Kolam		742.000.000				760.550.000
1	04	20	06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Terbangunnya sarana dan prasarana TPU	Arsel+Kumai+P. Lada	4 pa ket	742.000.000	APBD		4 pa ket	760.550.000
1	05			BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG								
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya perencanaan tata ruang	Kec. Arut Selatan		270.195.000				276.949.875
1	05	15	06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Tersusunnya zoning regulation	Kec. Kumai	2 set do	270.195.000	APBD		2 set do	276.949.875

